

## Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT yang Mahal

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Makarim, ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5).

Nadiem mengatakan akan melaporkan sejumlah isu di dunia pendidikan, termasuk mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini.

"Bahas beberapa isu pendidikan, mau lapor Pak Presiden," kata Nadiem, Senin siang.

"Iya (bahas uang kuliah tunggal), ada beberapa isu," ujarnya.

Nadiem tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.21 WIB dan langsung bergegas ke dalam istana untuk menemui Presiden Jokowi.

Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah universitas menuai banyak kritik. Beberapa di antara kampus yang menaikkan UKT adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas

Brawijaya (UB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Bersamaan dengan kenaikan UKT, sejumlah universitas juga turut menaikkan UKT, sejumlah universitas juga turut menaikkan UKT, sejumlah universitas juga turut menaikkan UKT.

Saat rapat dengan Komisi X DPR pada Selasa (21/5) lalu, Nadiem telah berjanji bakal membatalkan kenaikan UKT yang dianggap tidak masuk akal.

"Jadi kami mendengar banyak desas-desus, ada lompatan-lompatan yang cukup fantastis ya. Tadi dari Komisi X, terima kasih sudah memberikan masukan dan saya berkomit beserta Kemendikbud untuk memastikan," kata Nadiem, Selasa pekan lalu.

"Karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan, bahwa lompatan lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan ya," katanya menambahkan. ●han

## Korupsi PT Telkom Group, KPK Cegah 6 Orang ke Luar Negeri

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan enam nama ke Imigrasi Kemenkumham RI agar dicegah bepergian ke luar negeri. Hal itu untuk memudahkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di PT Telkom Group.

"KPK telah ajukan cegah untuk tidak melakukan aktifitas perjalanan keluar negeri ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap 6 orang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/5).

Ali mengimbau, agar kepada seluruh pihak yang dicegah untuk bisa bersikap kooperatif untuk hadir pada agenda pemeriksaan yang telah dijadwalkan. Hal itu, lanjut Ali, bertujuan untuk melengkapi alat bukti agar dapat efektif.

"Sikap kooperatif dari para pihak dimaksud, menjadi penting agar proses melengkapi alat bukti dapat efektif," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyidik kasus korupsi di Telkom

Group. Terbaru, lembaga antirasuah tersebut mengusut dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif senilai ratusan miliar Rupiah.

Ali mengatakan bahwa KPK sedang mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap adanya dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di PT Telkom Group.

"Pengadaan ini terindikasi fiktif, di mana terjadi pengeluaran uang negara secara melawan hukum dengan perhitungan sementara mencapai ratusan miliar rupiah," ujar Ali.

KPK telah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Namun, Ali belum mengungkapkan secara detail. Sebagaimana diketahui, KPK akan resmi mengumumkan identitas tersangka sekaligus konstruksi perkara saat melakukan penahanan.

"Basis utama KPK dalam mengumumkan secara lengkap para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka, konstruksi perkara dan pasal apa saja yang disangkakan ketika Tim Penyidik menilai alat bukti telah terukupi," ujarnya. ●han

## PAN Tidak Gentar jika PDI-P Usung Ahok pada Pilkada Sumut

JAKARTA (IM) - Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku tak gentar jika PDI-P jadi mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk berlaga pada Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

PAN bakal berada di barisan partai politik yang mendukung menantu Presiden Joko Widodo yang juga eks Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

"Masak kita takut dengan Ahok, kan enggaklah," kata Ketua DPP PAN, Saleh Dauly, kepada wartawan di DPR RI, Senin (27/5).

"Kalau di Jakarta mungkin Ahok kuat, kalau di Medan kan siapa tahu," lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa kandidasi Ahok baru sebatas wacana. Sementara itu, PAN disebut sudah secara lisan meminta Bobby untuk melakukan komunikasi politik dengan partai-partai yang ada.

"Kemudian mengungkap Bobby Nasution melakukan percepatan-percepatan akselerasi untuk meningkatkan elektabilitas," ucap Saleh.

Sebelumnya, Ahok mengakui, dirinya menerima tawaran maju sebagai calon gubernur Sumut pada Pilkada 2024.

"(DPP PDI-P Sumut) menawarkan dukungan maju," kata pria yang akrab disapa Ahok itu kepada wartawan, Sabtu (25/5).

Ahok tidak dengan tegas

mengatakan, apakah dirinya siap maju pada Pilkada Sumut 2024 sebagai kandidat usungan PDI-P atau tidak, sebagaimana klaim Ketua DPD Sumut PDI-P Rapidin Simbolon. Ia menegaskan bahwa keputusan terkait kandidat yang akan maju pada Pilkada 2024 belum terbit. PDI-P sendiri masih melangsungkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Jakarta pada 24-26 Mei 2024.

"Belum ada pembahasan terkait pilkada karena raker-

nas juga masih berjalan," ucapnya.

Ia menyampaikan terima kasih atas wacana pencalonan dirinya oleh DPD PDI-P Sumut meskipun ia mengaku tak begitu paham Sumut. Namun, lagi-lagi ia menegaskan, keputusan ada pada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPD PDI-P Sumut, Rapidin Simbolon, sebelumnya menyebut bahwa Ahok sudah menyatakan siap diusung dalam Pilkada Sumut 2024.

"Dengan Pak Ahok saya sudah dua kali berkomunikasi. Pak, kalau Anda diterjunkan di Sumut siap enggak, siap enggak Pak Ahok?," kata Rapidin menirukan pertanyaannya ketika ditemui wartawan pada Sabtu (25/5).

"Kalau sudah partai yang instruksikan, jangankan Sumut, ke Papua juga saya siap". Itu jawaban kader sejati," tambah dia menirukan jawaban Ahok. ●mei

# 2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



### KPK PERIKSA FUAD HASAN MASYHUR

Politisi Partai Golkar Fuad Hasan Masyhur (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/5). Mertua dari Menpora Dito Ariotedjo itu diperiksa sebagai saksi dari pihak swasta atau pemilik Maktour Travel dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

## AJI Sebut Revisi UU Penyiaran Bagian Skenario Pelemahan Masyarakat Sipil

Dalam RUU penyiaran terdapat pasal yang melarang media melakukan liputan investigasi.

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Bayu Wardhana, menyebut Revisi Undang-Undang Penyiaran bagian dan skenario besar untuk mempreteli kebebasan pers, pelemahan masyarakat sipil, dan demokrasi di Indonesia. Itulah sebab AJI menolak keras RUU Penyiaran.

"Revisi Undang-Undang Penyiaran ini harus kita sikapi tidak hanya membangun atau ancaman bagi pers, tetapi kita harus lihat ada skenario besar,

ketika sebelum RUU ini, ada revisi UU MK. Kalau kita lihat ada empat pilar demokrasi, legislatif sudah dipreteli, yudikatif dipreteli, dan sekarang pers akan dipreteli. Ini skenario besar," ujar Bayu saat berorasi dalam aksi tolak RUU Penyiaran oleh massa gabungan dari organisasi jurnalis, pers mahasiswa, dan aktivis pro demokrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).

Di sisi lain, ada isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal

(UKT) yang membuat para mahasiswa saat ini kesulitan membayar UKT. Alhasil, orang-orang yang bisa masuk ke kampus pun hanya golongan tertentu saja yang mungkin tak kritis pada pemerintahan sekarang.

"Jadi, ini skenario besar kenapa kita harus tolak RUU Penyiaran karena ini bagian dari pelemahan masyarakat sipil, pelemahan demokrasi," tuturnya.

AJI menolak RUU Penyiaran, tapi juga pemotongan atau pemberangusan daya kritis mahasiswa, rakyat, hingga jurnalis. Palsanya, dalam RUU Penyiaran, para konten kreator pun bakal terkena peraturan KPI hingga melakukan

takedown manakala dia membuat konten kritis.

"Marilah kita satukan aspirasi kita untuk menolak RUU Penyiaran tanpa kompromi," seru Bayu.

Dalam RUU penyiaran, terdapat pasal-pasal yang mengancam, seperti larangan media melakukan peliputan investigasi, pasal tentang berita bohong hingga pencemaran nama baik. Padahal, pasal itu telah dicabut oleh MK sendiri. Dia membeberkan, investigasi yang dilakukan jurnalis sejatinya justru memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dia mencontohkan dalam kasus penembakan Brigadir J oleh Ferdys Sambo Cs, tanpa adanya investigasi dari jurnalis, masyarakat hanya tahu jika kasus itu hanyalah kasus perselingkuhan belaka.

"Lalu di kasus donasi ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang ternyata dikorupsi oleh pengurusnya, kalau tak ada

investigasi, masyarakat tidak tahu dan korupsi itu akan terjadi terus. Jadi dimana investigasi dampak buruknya, di mana?," paparnya.

Dampak buruk investigasi yang dilakukan jurnalis hanya ada pada para pelakunya saja, sedangkan pada masyarakat malah menjadi dampak baik. Selain itu, rancangan RUU Penyiaran pun dilakukan tanpa adanya pelibatan organisasi pers, bahkan Dewan Pers.

"Enggak pernah (AJI dilibatkan), bahkan Dewan Pers saja tidak diajak kok, itu dilakukan diam-diam, draftnya itu muncul karena bocor, kalau tak bocor kami juga tak tahu. Kalaupun diundang kami (akan) datang, tapi kami akan ngomong bahas periode depan saja lah, kan kalian sudah mau selesai, karena terlalu banyak masalah, ini tak hanya soal pers, soal konten kreator, terlalu banyak pasal yang dipersoalkan," katanya. ●han

## GovTech INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

JAKARTA (IM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menegaskan, SuperApps layanan pemerintah berbasis elektronik (GovTech) INA Digital bakal mengakomodasi program makan siang gratis presiden terpilih Prabowo Subianto.

Penyaluran bantuan sosial (bansos) akan diintegrasikan dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang menjadi salah satu dari 9 layanan prioritas ketika INA Digital mulai beroperasi pada September 2024.

"Itu (makan siang gratis) tentu akan terbantu dari ini. Ini (INA Digital) sebetulnya mengurai banyak masalah digital," kata Anas sesuai acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).

Identitas digital ini akan membuat segala bentuk bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran, mulai dari bantuan beras, bantuan pupuk, hingga program keluarga harapan (PKH). Sistem tersebut bakal menghindari

tumpah tindih penerima bantuan karena kesalahan data.

"Jadi kalau digital ID-nya beres berarti nanti bansos, bantuan pupuk, itu semua tidak tumpang tindih," ucap mantan Bupati Banyuwangi itu.

Ans menyebutkan, pemerintah belajar banyak dari Tiongkok dan India mengenai pemanfaatan layanan berbasis elektronik untuk mencapai target pembangunan. Contohnya, di India target pembangunan selama 47 tahun mampu diselesaikan selama 7 tahun karena mengadopsi identitas kependudukan digital yang disandingkan dengan pembayaran digital.

"Itulah sebenarnya pelajaran dari China sama India. Nah China bisa mengurangi kemiskinan 0,6 persen karena digital ID sama digital payment-nya jadi satu. Jadi tidak ada tumpang tindih lagi bantuan," katanya.

Sebagai informasi, saat ini layanan INA Digital sedang dalam tahap uji coba setelah menginteroperabiliskan seluruh sistem aplikasi yang dibangun Kementerian/Lembaga (K/L) masing-masing dan akan mulai beroperasi pada September 2024.

Rencananya bakal ada 9

layanan prioritas yang akan beroperasi lebih dulu pada September 2024 mendatang, yaitu pelayanan digital administrasi kependudukan, Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kulia, antrean rumah sakit, dan registrasi dokter.

Lalu, pembuatan atau perpanjangan STR tenaga kesehatan dan tenaga medis, sertifikasi vaksin, imunisasi, cek bantuan sosial, hingga izin penyelenggaraan event atau keramaian kepada kepolisian.

INA Digital bukan aplikasi maupun platform, melainkan berbentuk layanan terpadu sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo agar seluruh K/L tidak lagi mengembangkan aplikasi baru. Saat ini K/L harus menginteroperabiliskan aplikasi yang sudah banyak dibuat agar masuk dalam satu SuperApps tersebut.

"Jadi pemda, K/L diminta bapak presiden untuk menginteroperabilisasikan aplikasi yang ada sehingga di September nanti secara bertahap layanan INA digital ini di-GovTech ini akan berjalan melalui berbagai cara yang lebih mudah, simple, dan transparan," katanya. ●mei

FOTO: ANI



### AKSI WARTAWAN TOLAK REVISI UU PENYIARAN DI JAKARTA

Sejumlah wartawan menggelar aksi menolak revisi undang-undang penyiaran di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/5). Pewarta Foto Indonesia (PFI) bersama sejumlah organisasi profesi jurnalis di Jakarta menggelar aksi menolak revisi undang-undang penyiaran no 32 tahun 2002 yang dinilai berpotensi menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers.

## Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung), Febrie Adriansyah, dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sugeng melaporkan Febrie dan sejumlah pihak lainnya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan lelang Barang Rampasan Negara Benda Sita Korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama yang digelar oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung.

Saham itu ditawarkan dengan harga Rp 1,945 triliun dan mengakibatkan dugaan kerugian negara Rp 9,7 triliun.

"Untuk itu pada hari ini, secara bersama-sama kami telah melaporkan kepada KPK, ST Kepala Pusat PPA Kejaksaan selaku penentu harga limit lelang; Febrie Adriansyah, Jampidsus Kejaksaan selaku pejabat yang memberikan persetujuan atas nilai limit lelang," ujar Sugeng kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/5).

Selain Febrie dan ST, Sugeng yang datang bersama pengacara Deolipa Yumara, juga melaporkan pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Kemudian dari pihak swasta bernama Andrew Hidayat, Budi Simin Santoso, Yoga Susilo, yang diduga menjadi pemilik manfaat (beneficial owner) dari PT Indobara Utama Mandiri (PT IUM), juga dilaporkan ke KPK. Sugeng mengatakan, dalam kajian Dialog Publik yang digelar pada 15 Mei lalu, sejumlah aktivis dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), IPW, ekonom Faisal Basri, dan advokat Deolipa Yumara mengungkap adanya

dugaan persekongkolan jahat.

Mereka menduga, terdapat penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan lelang PT Gunung Bara Utama oleh PPA Kejaksaan Agung yang dimenangkan oleh PT IUM. Lelang digelar oleh PPA Kejaksaan Agung pada 18 Juni 2023.

Sebagai informasi, di dalam tanda bukti penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat KPK, tertera pihak terlapor atas nama organisasi KSST. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor Informasi : 2024-A-01597. Dalam tanda bukti penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat KPK, tertera pihak pelapor atas nama organisasi KSST.

Seperti diketahui, Febrie saat ini juga tengah menjadi sorotan karena diduga dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror saat makan malam di sebuah restoran di Jakarta. Tidak hanya itu, puluhan anggota Brimob juga berkonvoi dengan kendaraan taktis di Kejaksaan Agung.

Peristiwa ini membuat publik bertanya-tanya karena Jampidsus Kejaksaan Agung tengah menangani kasus dugaan korupsi tambang timah di Bangka Belitung. Sementara itu, sampai saat ini kedua lembaga penegak hukum itu belum memberikan penjelasan. ●han

### TELAH HILANG

Teloh Hilang : SHM

No. 03328/  
Kukusan

NIB :  
10.09.72.04.00431

Luas : 161 M

Kel. Kukusan,  
Kec. Beji Kota  
Depok

Atas nama :

Ny. NINGSIH